

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Surya Aripin (2018) : Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hak Ruju' Suami Dalam Perceraian Karena Khulu'.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i tentang Hak Ruju' Suami dalam Perceraian karena Khulu dan Bagaimana metode istinbat hukum Imam Syafi'i.

Penelitian ini berupa penelitian pustaka (*library research*). Sedangkan metode pengumpulan data bersumber dari bahan primer yang diambil dari sumber aslinya dari kitab al-Umm dan juga dari bahan sekunder yang ada hubungannya dengan pembahasan dari kitab-kitab fiqih, ushul fiqih, hadis dan tafsir serta dari bahan tersier seperti ensiklopedi, kamus, dan lain-lain, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *diskriptif dan analisis konten*.

Dari hasil penelitian tentang status perceraian karena khulu' dapat dikemukakan, bahwa bila seorang isteri telah melakukan khulu' terhadap suaminya, maka dengan khulu' tersebut bekas isteri menguasai dirinya sendiri secara penuh, suami tidak berhak meruju'nya kembali. Segala urusan berada di tangan bekas isteri, sebab ia telah menyerahkan sejumlah harta kepada suaminya guna melepaskan dirinya.

Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* membolehkan *ruju'* bagi suami yang telah menjatuhkan *talaq* secara *khulu'* kepada istri yang dalam keadaan *safihah*, dan beliau berpendapat orang yang safih masih dalam kekuasaan *currator*. *Istinbat* hukum yang beliau gunakan dalam permasalahan *mahjur* mengambil dasar Q.S. al-Baqarah ayat 282 dan Q.S. an-Nisa ayat 6, beliau menetapkan kondisi kanak-kanak, orang lemah akalnya, anak yatim dan safih ditaruh di bawah kekuasaan wali.

Pendapat Imam Syafi'i tersebut bila diterapkan di Indonesia, penulis rasa kurang tepat, mengingat kondisi sosial masyarakat muslim Indonesia berbeda dengan kondisi di era beliau, adapun perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah *talaq* dan tidak dapat *diruju'* kembali, akan tetapi imam Syafi'i memperbolehkan suami untuk *meruju'* bekas istrinya.